



► PENERIMAAN SISWA BARU

Pemalsuan Data PPDB Masuk Pidana

**Andreas Yuda Pramono, Lugas
Subarkah, & Jumali**
redaksi@harianjogja.com

GUNUNGGKIDUL—Pemalsuan data dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DIY dapat dipidanakan.

Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul akan mengkaji potensi pembatalan calon siswa (casis) apabila ada yang terbukti memalsukan data/keterangan dalam dokumen persyaratan PPDB 2024. Sekretaris Disdik Gunungkidul, Agus Subariyanta, mengatakan

pemalsuan data dapat mengarah pada sanksi pelanggaran pidana. Orang tua/wali siswa juga telah membuat surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai terkait dengan kebenaran data sebelum proses PPDB.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas tentang petunjuk teknis pedoman PPDB 2024 memang tidak secara *rigid* mengatur mekanisme rinci pembatalan casis.

► Halaman 10

Pemalsuan Data...

"Kami bisa mengikuti mekanisme tindak lanjut pemalsuan data sesuai ketentuan yang berlaku. Pemalsuan bisa masuk delik pidana.

Di dalam surat pernyataan juga dinyatakan kalau memang ada ketidakbenaran data dan sebagainya, kasus bisa dibatalkan," katanya, Selasa (2/7).

Di Kabupaten Bantul, sejumlah orang tua siswa masih saja mendatangi Posko PPDB di Kantor Disdikpora, Selasa. Mereka datang ke posko berkaitan dengan adanya kendala dalam pendaftaran PPDB SMP untuk jalur zonasi.

Salah satu orang tua siswa asal Pleret, Bantul, Is Purnomo mengatakan anaknya terancam tidak dapat sekolah negeri karena dalam kartu keluarga berstatus famili. Padahal anaknya tersebut sudah diadopsi sejak usia 1 tahun. "Enggak bisa masuk di mana-mana. Pilihan pertama, di SMPN 1 Pleret, tapi tetap enggak bisa masuk karena meski nilainya bagus tapi usianya terlalu muda," katanya.

Oleh karena itu, Is berharap jika tidak bisa masuk ke SMPN1 Pleret, anaknya bisa masuk ke SMPN Banguntapan 2 atau ke SMPN 2 Pleret yang merupakan pilihan kedua dan ketiga. Namun, di dua SMP tersebut anaknya terancam gagal masuk melalui jalur zonasi, karena adanya kendala pada Kartu Keluarga. "Karena di KK statusnya masuk famili," ucap Is.

Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto mengatakan kasus yang dialami oleh Is Purnomo sejatinya tidak perlu terjadi. Jika Is Purnomo mampu menunjukkan bukti surat resmi adopsi, persoalan tersebut bisa teratasi. Ia mencontohkan beberapa kasus terkait dengan adopsi anak dan belum pecahnya KK dari keluarga induk.

"Dan itu bisa diselesaikan jika mampu menunjukkan akta kelahiran. Di akta kan jelas siapa bapak ibunya. Nantikan bisa dicek. Kalau adopsi asal dia bisa tunjukkan surat resmi adopsinya dan diperkuat keterangan dari pengadilan, dia bisa daftar."

Tak Ada Pungutan

Sementara itu, Disdikpora Kulonprogo memastikan selama masa daftar ulang sekolah di wilayahnya tidak ada pungutan atau gratis. Kepala Bidang SMP Disdikpora Kulonprogo, Dorajatun Kuncoroyakti, menyebut selama pantauannya ke sejumlah sekolah negeri dibawah kewenangannya diketahui proses daftar ulang berjalan lancar. "Hanya satu-dua siswa yang belum daftar ulang," ungkapnya.

Terkait dengan SMP negeri yang dayaampungnya belum memenuhi, jelas Kuncoro, Disdikpora Kulonprogo tidak memiliki mekanisme khusus untuk memenuhinya. Kuncoro menyebut instansinya sudah mengarahkan siswa yang belum

dapat sekolah untuk mendaftar ke SMP yang masih ada dayaampungnya. "Sudah kami arahkan kemarin, sekarang sudah ditutup tidak ada mekanisme pemenuhan dayaampung lagi," ujarnya.

Kuncoro menyebut jawatannya juga terus berkoordinasi dengan sekolah swasta agar dapat menampung lulusan SD di Bumi Binangun itu. "Kami ingin seluruh siswa yang ada mendapat akses ke SMP, tidak ada yang tak melanjutkan pendidikan."

Adapun, PPDB SMP di Kota Jogja masuk proses verifikasi pendaftaran pada jalur zonasi daerah, afirmasi KMS, dan prestasi luar daerah.

Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi Dinas Dikpora Kota Jogja, Manarima, menyebut tren pada ketiga jalur ini nyaris tak ada permasalahan yang berarti.

Jalur zonasi daerah masih menjadi jalur paling favorit dan menduduki presentase kuota terbesar yakni 44%. Angka ini setara dengan 1.676 bangku yang tersebar di 16 SMP negeri di Kota Jogja. Sementara, jalur afirmasi KMS mendapat jatah kuota 11% dan prestasi luar daerah 10%. Kuota pada masing-masing jalur tak akan memengaruhi kuota pada jalur lainnya. "Jadi 44 persen dalam kota itu tidak akan dimasuki oleh 10 persen luar kota dan yang 11 persen khusus untuk afirmasi KMS," ujar Manarima. (Aiff Annissa Karin & Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005